

# MENUJU KKN UIN SUNAN KALIJAGA YANG RESPONSIF-KONTEKSTUAL

## Catatan Pengalaman Peserta KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-67

*Bernando J. Sujibto*

### Abstrak

KKN sebagai sebuah diskursus, di mana di dalamnya terjadi sebuah proses dan organisme yang terus mengalami revisi-revisi baik orientasi, paradigmatik ataupun implementasinya di lapangan. Saya memasuki diskursus KKN berposisi sebagai seorang mahasiswa yang menjadi pelaku karena saya baru saja merampungkan tugas KKN dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan ke-67 yang berlokasi di Kelurahan Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Bagi saya KKN yang responsif adalah KKN yang telah melewati pembacaan dan penelitian terhadap fenomena terbaru di lingkungan sosial masyarakat sehingga *impact* yang diterima oleh dunia kampus bisa sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan sesuatu masyarakat. Untuk menuju fase ini dibutuhkan proses komunikasi deliberatif yang melibatkan banyak pihak terutama *stakeholder* masyarakat sendiri.

### A. Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah menjadi elemen penting bagi proses pencaharian eksistensi sebuah universitas yang mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT). Karena pengalaman Tri Dharma PT, khususnya tentang pengabdian kepada masyarakat, menjadi ruh dan kinerja KKN selama ini. KKN telah banyak membantu secara multidisipliner dan mengabdikan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program-program baik

infrastruktur ataupun *soft-skill*. Dua hal ini menjadi sangat penting keberadaannya dalam pembangunan masyarakat menuju manusia yang handal. Dengan alasan itu, KKN masih tetap dipertahankan oleh universitas-universitas besar sekelas UI, UGM, dan UIN Sunan Kalijaga meskipun juga tidak sedikit yang menghapuskannya dari intrakulikuler sistem pembelajaran di kampus, dan sebagian ada yang memilihnya sebagai materi pilihan.

Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut harus dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan integral. Sehingga hasil yang diharapkan dari proses civitas akademika menjadi terwujud sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, seperti mampu melakukan penelitian, dan siap mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia. KKN masih menjadi media akomodatif sejauh ini yang bisa memwadahi proses pengabdian dunia akademik (mahasiswa) kepada masyarakat.

Di samping itu, kegiatan KKN juga menjadi pemaksanaan dari amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat". Pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat". Ketiga hal di atas memang tidak bisa dilepaskan agar hasil yang didapatkan bisa maksimal dan integral.

Melalui artikel ini saya mengajak diskusi tentang KKN sebagai sebuah diskursus, di mana di dalamnya terjadi sebuah proses dan organisme yang terus mengalami revisi-revisi baik orientasi, paradigmatik ataupun implementasinya di lapangan. Saya memasuki diskursus KKN berposisi sebagai seorang mahasiswa yang menjadi pelaku karena saya baru saja merampungkan tugas KKN dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

angkatan ke-67 yang berlokasi di Kelurahan Kricak, Tegallrejo, Kota Yogyakarta. KKN semester pendek yang berdurasi sekitar 50 hari ini, sejak 10 Juli sampai 31 Agustus 2009, telah memberikan beberapa catatan kaki (*footnotes*) khususnya bagi orientasi KKN UIN Sunan Kalijaga ke depan. Pendekatan kritis dari pengalaman empiris yang saya dapatkan dari lapangan akan memungkinkan tulisan ini menjadi bahan hipotesa lanjutan bagi reorientasi (atau rekonstruksi) KKN UIN ke depan, yang responsif dan kontekstual.

Secara spesifik, tulisan ini nanti akan membahas KKN konvensional<sup>1</sup> ala UIN Sunan Kalijaga ketika masuk dalam konteks wilayah (area) kota sebagai objek dan sasaran lokasi KKN. Karena di sini ada pergeseran objek (apakah semacam *trial-error* atau memang hasil diskusi serius antara LPM dengan Pemerintah Kota Yogyakarta?) dari desa (*remote area*) seperti yang telah biasa dilakukan UIN sejak awal ke area kota, seperti yang dilakukan perdana dalam angkatan ke-67.

Dalam konteks ini, ada persoalan mendasar yang seperti halnya belum sepenuhnya menjadi pertimbangan pelaksana KKN angkatan 67. Padahal, keberanian menerjunkan KKN di area kota—apalagi kota Yogyakarta sendiri—harus diikuti dengan pematangan konsep, paradigma serta artikulasinya di lapangan, setelah melewati kajian kontekstual dan responsif. Jika mau

---

<sup>1</sup> “KKN konvensional” adalah KKN yang menggabungkan dan mengintegrasikan pengetahuan agama Islam, ditopang dengan kapasitas keilmuan prodi/jurusan atau fakultas yang menjadi basis setiap program kerja individual di lapangan (*definisi ini berdasarkan hasil audiensi penulis dengan ketua LPM dan staf panitia KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 67, 21 Agustus 2009*). Dalam “KKN konvensional” semua tema, metode, dan pratek kerja di lapangan nyaris sama dan menjadi turun-temurun dalam tradisi KKN UIN Sunan Kalijaga sejak dulu. “KKN konvensional” telah menjadi cirikhas KKN UIN Sunan Kalijaga sejauh ini. Di tengah perubahan praktek KKN seperti yang dilakukan di UGM seperti “KKN tematik” dan yang terbaru adalah “KKN tematik-kontekstual”, “KKN konvensional” masih tetap menjadi pilihan UIN Sunan Kalijaga. Di samping itu UIN Sunan Kalijaga juga pernah melaksanakan “KKN integratif”, namun naifnya pendekatan, dalam artian hipotesa dan kultur-formal yang terbangun, masih yang sama—sebagai warisan dari yang terdahulu—selain hanya mengubah istilah luarnya saja (mungkin biar lebih elegan dan relevan dengan kegiatan UIN Suka, yaitu integrasi dan interkoneksi).

didasarkan kepada fakta sosial (*social fact*) yang terus mengalami komodifikasi, maka persiapan seperti observasi, orientasi, dan implementasi KKN di kota harus mendapatkan porsi yang dominan. Sekarang tidak boleh sekedar mengekor (atau mewarisi) metode dan paradigma KKN konvensional yang telah lalu, dengan objek dan area desa, ke dalam konteks kota. Dalam diskusi ini ada dua objek yang sepenuhnya berbeda dan mempunyai aspek-aspek kompleks antara desa dan kota sebagai tempat KKN.

Tulisan ini hanya menjadi sebuah perbandingan—dari pembacaan seorang mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora angkatan 2006 dengan KKN yang terdahulu—atau hanya sebagai catatan (*memorial*) atas pengalaman perdana KKN UIN di area kota bagi mahasiswa ataupun pihak LPM dan UIN sendiri. KKN di area kota adalah yang pertama sejak KKN dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga. Sehingga tidak ayal jika orientasi objek yang berbeda tersebut mempunyai akibat *misunderstanding* dan ketidaksesuaian secara mendasar anatara program yang dilaksanakan oleh KKN UIN dengan realitas riil di lapangan. Di samping itu, kota harus diperhatikan secara mendalam dan komprehensif tentang dinamika dan pergulatan yang terjadi di dalamnya.

Catatan pengalaman ini diharapkan menjadi sebuah abstraksi tambahan bagi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), penanggung jawab KKN UIN, para Dosen Pembimbing, ataupun mahasiswa sendiri yang pada gilirannya akan mengalami KKN di kota Yogyakarta. Karena KKN UIN dalam 3 tahun ke depan masih berlokasi di sekitar kota Yogyakarta, berdasarkan MoU dengan pemkot yang menyepakati tentang KKN berwawasan Lingkungan.

## **B. Indonesia dan Kuliah Kerja nyata**

Jika ada statemen bahwa KKN merupakan produk asli Indonesia, hal itu bisa diterima karena PT yang memasukkan

materi KKN sebagai intrakulikuler telah mengatur mekanisme dan persiapan formal lainnya dengan rapi. Bentuk pengabdian yang diartikulasikan dalam KKN seperti aturan tinggal (*stay*) selama dua bulan bersama/di masyarakat telah membedakan secara partikular dengan bentuk-bentuk program kampus lainnya seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL). PT luar negeri pun belum ditemukan praktik KKN seperti yang dilakukan di Indonesia. KKN mempunyai dimensi lebih dalam aspek interaksi dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Setidaknya begitulah rasa dan suasana KKN yang melekat di benak mahasiswa eks KKN sejauh ini.

Secara historis KKN telah menyajikan sebuah dinamika yang kompleks dan menantang baik bagi PT ataupun mahasiswa yang bekerja di dalamnya. Karena dalam konteks ini, KKN, yang notabene adalah mahasiswa dari PT atau universitas yang hanya mengenal dan menguasai teori, diharapkan terus menjalin sinergi dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer. Sehingga komunikasi yang didasarkan atas pembacaan ilmiah antara dunia akademik dengan dunia riil masyarakat bisa mengatasi kesenjangan peran dan peranan PT di mata masyarakat Indonesia sendiri. Saya menilai pilihan untuk KKN bagi PT atau universitas adalah sebuah langkah pristisius yang mulia dan elegan. Karena dengan menerjunkan mahasiswa KKN ke sebuah area maka proses pembelajaran tentang fenomena dan realitas sosial di lapangan akan cepat terjadi. Pematangan yang bersifat empirisme seperti itu akan melahirkan sebuah perspektif kokoh dan dapat menjadi bahan dalam sebuah penelitian lebih lanjut, sebagai suatu bangunan dan konstruksi teori menuju tesis yang dapat dipelajari oleh banyak pihak.

Ketika universitas-universitas penting di Indonesia mengagagas KKN seperti Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Universitas Andalas (Padang) dan Universitas Hasanudin (Ujung Pandang/Makassar) di awal tahun 1970-an, eksistensi PT dalam mengamalkan Tri Dharma-nya sudah mulai terbaca. Karena



praktik pengabdian di lapangan, jika bukan melalui tenaga KKN, masih sangat minim realiasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai mitra sinergis dunia kampus. Meskipun sudah mulai bertumbuhan pusat-pusat studi yang dikembangkan oleh PT dan universitas terkenal di negeri ini seperti Pusat Studi Pedesaan dan sebagainya, ternyata kehadirannya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dalam perjalanannya, lembaga-lembaga tersebut mulai terperosok menjadi LSM (NGOs) pesanan yang haus kegiatan sehingga paradigma yang dikembangkan pun mengarah kepada kepentingan materi dan uang (*money oriented*). Dalam kondisi demikian, sangat sulit gagasan atau hasil penelitian yang ditelorkan oleh dunia akademik bermanfaat secara merata ke dunia riil, yaitu masyarakat itu sendiri.

KKN di PT Indonesia bagi saya adalah sebuah keniscayaan dari kultur masyarakat yang hidup secara gotong royong satu sama lain. Masyarakat Indonesia sudah mengenal semangat dari kultur gotong royong ini sejak dahulu kala, terutama sebagai manifestasi dari rasa satu nasib dan seperjuangan di bawah tindasan penjajahan yang panjang di Tanah Air ini. Semangat gotong royong kemudian dipolarisasi dalam ranah politik kabinet seperti dalam kabinet Megawati, yang dikenal dengan nama "Kabinet Gotong Royong". Upaya tersebut adalah sebetulnya interpretasi kita terhadap tradisi dan kebudayaan yang ada sejak nenek moyang. Interpretasi semacam itu harus diapresiasi menuju pembelajaran bagi bangsa yang berdaya, cerdas, dan mandiri ke depan.

Jadi, hadirnya KKN di Indonesia bukanlah lahir dari ruang hampa, namun ia lahir sebagai perwujudan dari pergulatan kebudayaan manusia-manusia Indonesia itu sendiri dari proses deliberasi yang intens. Maka sangat tepat jika pekerjaan luhur ini harus dirawat dan dikembalikan kepada spirit awal, sebagai

saham mahasiswa khususnya terhadap proses pembangunan<sup>2</sup>. Spirit ini pada gilirannya akan menjadi landasan yang memberikan ruang pemaknaan yang intens di lapangan, baik diimplementasikan melalui program-program KKN ataupun melalui tim khusus yang bisa mengomunikasikannya.

### C. KKN Konvensional: Sebuah Kritik

Di atas telah saya uraikan sesuai yang saya tahu tentang apa itu “KKN konvensional”. Istilah konvensional terkesan ambigu dan tidak jelas jika ditarik dalam konteks KKN sebagai “diskursus” atau “proses menjadi” (*being*). Pertanyaannya: apakah tidak ada perkembangan progresif tentang KKN ketika disinggung dengan fenomena sosial masyarakat yang berubah? Apakah KKN UIN Sunan Kalijaga hanya mengambil gaya positivis-formal sejak dahulu kala tanpa ada pembacaan kritis terhadap fenomena sosial yang tengah terjadi? Padahal, perubahan sosial masyarakat dewasa ini begitu cepat dan siapa pun atau apa pun bisa jauh terlampaui – dari modern menjadi postmodern, dengan dipadani lahirnya istilah post, pasca, atau bahkan *beyond*. Hal ini menunjukkan betapa kilatnya manusia-manusia postmodern dengan teknologi sebagai pembungkusnya yang gempita abad ini. Terma masyarakat yang berlari, meminjam tesis Anthony Giddens, untuk memaknai peralihan yang kompleks dari modern ke postmodern harus disiasati secara cepat oleh dunia civitas akadika agar terjadi sinkronisasi antara teori dengan realitas sosial Indonesia.

---

<sup>2</sup> Lihat buku *Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2009); hal 1. Saya menginterpretasi kata “pembangunan” di sini bukan sebagai kata warisan Orde Baru. Meskipun pada awalnya mempunyai korelasi ke sana, namun “pembangunan” harus dipahami sebagai sebuah proses sinergi dan bersama antara dunia kampus dengan masyarakat sendiri. Di sini pembangunan oleh massa (dalam artian dilakukan oleh *people*) bukan pembangunan massal, seperti dilakukan oleh Mahatma Gandhi, harus menjadi landasaannya. Dalam konteks ini, relasi kemitraan dan proses sinergisasi akan tercapai antara dunia kampus, sebagai kaum terdidik yang bisa memetakan sebuah persoalan, dengan masyarakat sendiri yang posisinya harus disejajarkan sebagai partner.

Jadi bagi saya kata konvensional sudah tidak berlaku lagi di era ini. Istilah konvensional adalah warisan kaum positivis-formal yang berpradigma strukturalis murni. Jika KKN UIN masih berpijak kepada persepsi konvensional-klasik<sup>3</sup>, ketika diujicobakan di area kota seperti yang saya alami selama KKN angkatan ke-67, *misunderstanding* dan ketidakrelevanan sangat terasa. Bahkan jarang ada komunikasi sinergis antara mahasiswa dengan masyarakat yang bergulir secara intens dan akrab.

Kata konvensional adalah adjektiva dari *konvensi* yang berasal dari bahasa Latin *conventio* (berarti *meeting* atau *covenant*). *Covenant* mempunyai arti yang cukup radikal dan serius yaitu perjanjian serius (*solemn agreement*) yang dalam konteks teologi Kristiani disebut sebagai *an agreement held to be basis of a relationship of commitment with God*<sup>4</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *konvensional* mempunyai arti 1. Permufakatan (kesepakatan) umum (terutama mengenai adat, tradisi, dsb); 2. Perjanjian antara negara-negara, para penguasa pemerintahan, dsb; dan 3 konferensi tokoh-tokoh masyarakat atau partai politik dengan tujuan khusus (memilih calon-calon buat pemilihan anggota). Konvensional pada gilirannya akan menjadi *mainstream* dan narasi besar (*grand narration*) dalam semua aspek yang diterima dan dijelaskan secara problematik. Maka dari itu, KKN alternatif, seperti yang dilakukan oleh UGM khususnya dengan “KKN tematik”-nya, bisa menyelamatkan dari *grand narration* itu.

Bagi saya kata konvensional dekat dengan makna “kompromi”. Ia bertendensi kurang kritis karena mempunyai pemaknaan kompromis dan pro-kemapanan, atau bahkan konservatif. Gaya ini hampir bisa dikategorikan dalam sistem

---

<sup>3</sup> Saya katakan konvensional-klasik karena metode(logi) KKN seperti ini sudah sejak awal menjadi model KKN UIN Sunan Kalijaga tanpa ada proses sinergisasi kritis dengan problem-problem mendasar dan fenomena sosial masyarakat.

<sup>4</sup> Lihat dalam *Concise Oxford Dictionary - Tenth Edition* (versi digital)



masyarakat feodal yang semuanya mendahulukan unsur kompromi dan nominasi keamanan kelas elit meskipun kenyataannya penuh dengan ketimpangan yang akhirnya berbias deskriminasi di dalamnya. Sudah jelas mazhab Frankfurt (*Frankfurt Schools*), sebagai kaum neo-Marxist yang dimotori Adorno dan Habermas akan mengejek keamanan dan kompromi dengan menawarkan teori kritis sebagai kegiatan ilmu pengetahuan yang menjadi sumbangsih penting abad ini. Karena faktanya, persepsi konvesnisonal tidak menyelamatkan kehidupan sosial masyarakat, dan justru sebaliknya ia akan akan melahirkan pembelengguan dan penjumudan (*frozen*) di mana kritsisme mati terkubur di dalamnya.

Ketidakrelevanan bentuk KKN yang ditawarkan UIN Sunan Kalijaga sejauh dapat saya temukan ketika objek dan sasarannya adalah kota. Maka dari itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KKN UIN harus mempersiapkan diri dengan observasi yang bernas dan ilmiah dalam memahami dan memberikan respon terhadap fenonema sosial kota. Sehingga KKN UIN Suka tidak terjerumus menjadi semacam tradisi dan ritual hampa yang hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan SKS belaka.

#### **D. Memahami Kota**

Memahami kota adalah memahami konteks. Konteks dalam artian sebuah arena dan ruang publik dimana proses KKN sedang dilangsungkan. Untuk menyiasati KKN di kota agar mempunyai peran dan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat kota secara substantif maka dibutuhkan pendekatan pemahaman terhadap kota (*understanding city*) dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Setiap kota mempunyai akar sejarah dan budaya masing-masing. Sehingga pendekatannya pun akan senantiasa beragam sesuai dengan situasi empirik kota itu sendiri.

Dalam sebuah memoarnya yang monumental, Orhan Pamuk, novelis peraih Nobel Sastra 2006 asal Turki, menuliskan tentang kota Istanbul dalam buku *Istanbul: Memoar sebuah Kota*. Refleksi kritis yang dituliskan Pamuk yang bisa diambil dalam konteks kajian ini adalah tentang sebuah lanskap kebudayaan dan peradaban sebuah kota. Kebudayaan atau peradaban kontemporer sebuah kota, bagi Pamuk, dibentuk oleh sejarah masa silamnya yang akan menjadi memori kolektif bagi sebuah bangsa. Sehingga pendekatannya pun diperlukan tentang pemahaman akar tradisi dan kebudayaan yang telah melekat dan menjadi identitas bagi sebuah kota.

Yogyakarta, dalam beberapa hal terutama dalam aspek tradisi dan kebudayaannya yang kuat dan khas, mempunyai korelasi dengan Istanbul. Namun bedanya, Istanbul sudah dirasuki model modernitas Barat (Eropa) yang mudah mulai dominan sehingga budaya setempat terus terkikis, sementara Yogyakarta masih lebih stabil dan ajeg dalam menjaga tradisi lokalnya. Namun, tesis yang bisa diambil adalah tentang pemahaman komprehensif ihwal tradisi dan budaya yang menjadi akar sebuah kota.

Setelah itu, pembacaan berikutnya adalah terletak kepada proses asimiliasi budaya setempat dengan faktor-faktor eksternal yang mulai masuk di Yogyakarta. Komodifikasi budaya di Yogyakarta mulai menjadi trend tersendiri yang akhir-akhir ini meruntuhkan keajegan tradisi yang dijaga kraton sebagai simbol kota Yogyakarta. Maraknya budaya luar, dengan ongkos globalisasi yang sangat murah, ternyata gampang diterima (*acceptable*) oleh penduduk pendatang (baca: mahasiswa) Yogyakarta sehingga kota gudeg ini pun menjadi arena kontestasi ekonomi konsumsi yang tinggi sekali dengan model-model terbaru yang mudah diakses.

Dua sisi di atas, antara *defense* tradisi dan industri-market, menyajikan kerumitan tersendiri untuk dikaji menurut studi sosio-kultural. Inilah kemudian yang membuat kegiatan penye-

lidikan (*inquiry*) terhadap fenomena sosial kota Yogyakarta menjadi menarik dan membutuhkan kerja ekstra para peneliti dari dunia akademik, sebelum kemudian menerjunkan mahasiswa ke lapangan.

Dalam teori sosiologi, kota, meminjam pemetaan Emile Durkheim, selalu dekat dikategorikan sebagai masyarakat organik. Solidaritas yang berkembang pun adalah solidaritas yang berdasarkan kepada sistem dan strata sosial yang ketat dan struktural-formal. Ciri yang masih relevan dengan masyarakat Indonesia sekarang adalah bentuk interaksi yang eksklusif-formalistik. Di samping itu, mobilitasi sosial dititikberatkan kepada hukum formal yang berlaku karena individu-individu di kota mempunyai intensitas kesibukan sendiri-sendiri sehingga sikap egois dan acuh terhadap lingkungan sekitar terasa kentara.

Sementara desa adalah fenomena sebaliknya. Ia menjadi area kerja kolektif-massa dimana kebersamaan dan gotong royong menjadi basis dalam setiap aktivitas mereka. Masyarakat yang hidup di area ini berkembang secara mekanis dengan proses interaksi sosial yang mendahulukan kekuatan kolektivisme. Sehingga di sini hampir tidak ditemukan kepentingan individual di atas kepentingan komunal-kolektif. Suasana yang berkembang dalam konteks ini adalah sikap deliberatif yang menjadi dasar kebersamaan mereka di desa.

Suatu tesis yang penting diangkat dalam rangka memahami kota secara lebih komprehensif adalah dari sosiolog kelahiran Spanyol Manuel Castells (1942) yang dikenal sebagai pelopor sosiologi urban melalui karyanya berjudul "*The City and The Grass Roots* (1983). Dalam buku ini, Castells menganalisis kota sebagai kreasi warga (*creation of people*), yaitu gerakan akar rumput perkotaan. Castells menekankan kepada penafsiran dan persepsi kota di mata penduduknya dimana tindakan mereka merupakan cermin dari proses konstruksi antara penduduk kota dengan ruang (*space*) kota sendiri.

Secara serius karya monumental *Castells The City and the Grassroot* menganalisis tentang studi komparatif terhadap gerakan-gerakan sosial perkotaan dan pengorganisasian masyarakat akar rumput yang didasarkan pada penelitian empiris di Perancis, Spanyol dan Amerika Latin.<sup>5</sup> Di sinilah posisi kreasi warga itu, di mana kebudayaan dan gerakan sosial warga kota terletak kepada pergumulan warganya (*grassroot*) melalui interaksi yang berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka. Lemahnya, Castells tidak mempresentasikan esensi ekologi sebagai bagian penting dalam membentuk karakter dan gerakan sebuah kota. Padahal posisi ekologi perkotaan dewasa ini sangat menentukan dalam proses konstruksi kota itu sendiri.

Ketika kita memahami bahwa kota adalah merupakan wujud kreasi dari orang-orang yang berdiam di dalamnya, pendekatan-pendekatan komprehensif untuk membongkar fenomena itu harus dipersiapkan demi kematangan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN selanjutnya. Pendekatan sosiologis penting dikerahkan dalam upaya menemukan aspek-aspek kritis dan krusial di balik kehidupan kota. Sejauh saya memasuki area kota dalam pelaksanaan KKN kali ini, saya menemukan beberapa catatan tentang fenomena masyarakat urban di kelurahan Kricak kecamatan Tegalrejo.

*Pertama* strata sosial masyarakat kota. Di Kricak ada dua strata sosial yang secara gamblang dapat kita identifikasi dan memberikan pengaruh kuat kepada interaksi dan solidaritas sosial antar penduduk, yaitu antara *kelas elit* dan *kelas buruh*. Dalam hal ini saya tidak hendak membicarakan tentang kelas social ala Karl Max, tapi yang jelas berdasarkan pembacaan saya terhadap masyarakat Kricak menemukan fenomena tersebut. Dua kelas di atas secara ketat mempengaruhi paradigma masyarakat

---

<sup>5</sup> Akses lebih lanjut di: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/21/pustaka/869413.htm>

kota itu sendiri dalam proses memahami, interaksi, atau penerimaan terhadap orang lain. Pertama adalah kelas elit. Elit di sini saya artikan secara luas dan tidak ketat, yaitu mereka yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan sekaligus mempunyai pekerjaan mapan. Masyarakat yang masuk kelas ini biasanya mempunyai kesibukan yang ekstra dan bahkan jarang memedulikan lingkungan sekitar.

Kelas ini biasanya lebih eksklusif dalam bergaul dan jarang mempunyai waktu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kedua adalah kelas buruh. Mereka adalah penduduk kota yang tinggal seadanya dan kebanyakan bekerja serabutan. Meskipun ada yang bekerja dengan waktu yang teratur, namun penghasilan mereka hanya cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Manusia yang ada dalam kategori ini biasanya lebih banyak bertemu dengan mahasiswa KKN, namun mereka juga mempunyai pemahaman yang sama dalam hal materi (kerja, uang, dan kekayaan) dengan kelas elit. Sehingga obsesi mereka mempunyai pengaruh terhadap interaksi dan harmonisasi antarmasyarakat sendiri. Mereka banyak mengabaikan aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan nilai filantropis, selain hanya memenuhi kewajiban secara struktural saja.

Bagi masyarakat tipe pertama di atas, implikasi logisnya adalah kepada kesenjangan sosial sangat dominan. Pendekatan yang dipakai dalam mengakomodasikan fenomena di atas tidaklah mudah karena hal ini terkait dengan pengalaman dan proses interaksi yang telah menjadi karakter kota sejauh ini. Sehingga program KKN yang hanya memberikan pintu dan akses kepada satu golongan kelas, bersiaplah untuk tidak direspon. Sementara di pihak lain, pengalaman dan ilmu dari kalangan elit yang jelas tidak seimbang (*balance*) dengan kelas buruh juga menjadi obstruksi dalam mengupayakan sinergisitas keduanya. Di sinilah salah satu kerumitan pengalaman saya di lapangan.



*Kedua* agresifitas kota. Kita harus paham bahwa kota adalah arena kontestasi yang nyata, baik secara ekonomi, politik, ataupun sosial. Dengan disokong akses kepada kota Yogyakarta, masyarakat pinggiran kota banyak menggantungkan kehidupannya kepada irama kota sehingga pengaruh-pengaruh negatif di balik agresifitas kota, yang sebenarnya membutuhkan filterisasi, ditelan secara mentah di tengah keterbatasan ilmu dan kreativitas masyarakat kota. Dalam memahami masyarakat kota tipe kedua di atas dibutuhkan pemetaan yang *rigid* ihwal masalah prioritas dan tidaknya yang nantinya bisa ditawarkan sebagai kegiatan KKN. Aspek-aspek kegiatan yang mempunyai nilai perubahan dan sesuai dengan kebutuhan mereka di tengah waktu yang sempit di atas, sangat menentukan dalam proses penerimaan penduduk setempat dengan program KKN yang ditawarkan.

*Ketiga* tingkat pendidikan masyarakat kota. Masyarakat kota Yogyakarta yang menjadi sasaran KKN UIN Suka kali ini mempunyai akses dunia pendidikan yang cukup. Mereka mempunyai kecakapan dalam hal menguasai teknologi informasi dan mempunyai peran partisipasi yang lebih dominan dalam setiap aktifitasnya. Bagi masyarakat seperti, penawaran program yang kreatif-inovatif sangat ditunggu. Namun, jika program yang ditawarkan oleh mahasiswa KKN sudah *out of date* bersiaplah ditinggalkan dan bahkan tidak ada respon sama sekali dari masyarakat setempat.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, pendekatan KKN konvensional UIN Suka ternyata belum menemukan relevansinya yang tepat sasaran. Maka dari itu kita membutuhkan pendekatan baru dalam palaksanaan KKN di kota, dimana pendekatan tersebut menjadi jalan yang seirama terhadap proses pembangunan kota ke depan. Sehingga masyarakat kota bisa menerima dengan mudah dan memberikan ruang kreatif bagi bagi mahasiswa KKN.

## E. Paradok UIN Sunan Kalijaga Versus Filantropi LPM

### 1. DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)

Di tengah pelaksanaan KKN saya menemukan masalah mendasar yaitu ihwal posisi DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yang tugasnya mendampingi mahasiswa dan memberikan arahan konstruktif di lapangan. Namun, peran DPL, seperti yang saya ketahui dari beberapa pertemuan saya dengan kelompok-kelompok KKN lain, tidak maksimal. Bahkan ada DPL yang tidak pernah mengunjungi kelompok-kelompok KKN di lapangan. Sementara, menurut hasil survey yang saya lakukan kepada peserta KKN angkatan 67, kehadiran DPL rata-rata hanya 4 kali sampai 6 kali. Dan kelompok saya di Kricak 8, DPL hanya datang dua kali ke lapangan dan itupun tidak memberikan warana apa-apa bagi proses pelaksanaan program kerja kami. Sementara kewajiban DPL, seperti sudah diamanahkan UIN, adalah 9 kali datang ke kelompok-kelompok KKN.

Saya anggap hal di atas sebagai masalah prinsipil di internal UIN dan LPM sendiri. Selesai audensi saya dengan jajaran LPM, saya mulai memahami beberapa anomali yang pada praktiknya sangat tidak kritis dan bahkan bisa dibilang naif bagi universitas sebesar UIN, atau mungkin ini terjadi di universitas lain di Indonesia yang melaksanakan program KKN. Menurut LPM, seperti disampaikan dalam audensi, para DPL yang sudah jelas dengan definisi Dosen Pembimbing Lapangan, tidak diberikan *cum credit* dengan materi yang berbobot 4 SKS ini.

Bagi saya, semestinya KKN harus menjadi Mata Kuliah (MK) yang juga sama nilainya dengan MK pengajaran di kampus, sehingga DPL mendapatkan jatah SKS dari KKN, dan sekaligus ini akan memberikan nilai kredit plus bagi proses kenaikan pangkat (rangking bagi dosen PNS). Kebijakan yang berjalan sejauh ini harus dikaji ulang oleh pihak UIN sendiri, demi memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada para

dosen yang mengabdikan diri di ranah pengabdian melalui menjadi DPL KKN tersebut. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi DPL untuk tidak rajin datang dan melaksanakan tugas ke-DPL-an secara maksimal, di samping kesejahteraannya harus diperhatikan juga.

## 2. Lemlit vs LPM

Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) sejatinya harus harmonis atau kalau boleh harus berada dalam "satu-rumah" demi tercapainya sinergi sehingga bisa merekam perkembangan apa yang terjadi di ranah (hasil) penelitian dengan fenomena terbaru apa yang terjadi di lapangan (melalui hasil interaksi pengabdian). Menyatunya dua lembaga ini di samping merampingkan birokrasi juga memudahkan sistem kerja yang maksimal karena dua lembaga ini, bagi saya, ibarat dua mata pisau yang saling mengisi keberadaannya.

Namun aneh sekali, bagi saya, jika dua lembaga di atas dipisahkan seperti terjadi di UIN Sunan Kalijaga sendiri. Entah paradigma apa yang dipakai mereka, para *stakeholders* UIN, dalam menyikapi dan menyusun cara kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang jelas, integrasi dan interkoneksi menuju kinerja yang sinergis membutuhkan kesamaan visi dan misi yang jelas di antara lembaga di bawah UIN.

Sebuah paradoks akan cepat terasa ketika kita melihat lebih dekat dengan kondisi LPM UIN Sunan Kalijaga sendiri: kantor yang sempit, fasilitas terbatas, kesejahteraan tidak terjamin, dan apresiasi secara legitimitas dari lembaga lain di UIN. Padahal LPM adalah cermin dari Tri Dharma nomor tiga yang keberadaannya dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Jika di lemmit banyak hibah uang penelitian, apa yang ada di LPM? Fakta ini adalah anomaly, bagi saya, untuk UIN Sunan Kalijaga.

### 3. Filantropi LPM

LPM, dengan misi pengabdian kepada masyarakat dari dunia akademik, bagaimana pun harus dipertahankan entah bagaimana pun bentuknya. Misi filantropis yang telah dilaksanakan sejauh ini baik melalui KKN atau desa binaan yang banyak dikelola LPM adalah sebetulnya pengabdian yang sejatinya menjadi justifikasi dari Tri Dharma PT yang diartikulasikan secara tepat oleh LPM.

Namun begitu, pembaca kritis terhadap fenomena social masyarakat juga harus menjadi agenda utama senbelum nanti terjun langsung ke lapangan. Maka dari itu, penting adanya lembaga penelitian yang memberikan akses dan informasi tentang kondisi riil terbaru di lapangan.

### F. Penutup: Menuju KKN Responsif-Kontekstual

Poin inilah yang sangat saya harapkan terwujud dari KKN UIN Sunan Kalijaga ke depan. KKN yang responsif adalah KKN yang telah melewati pembacaan dan penelitian terhadap fenomena terbaru di lingkungan sosial masyarakat sehingga *impact* yang diterima oleh dunia kampus bisa sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan suatu masyarakat. Untuk menuju fase ini dibutuhkan proses komunikasi deliberatif yang melibatkan banyak pihak terutama *stakeholder* masyarakat sendiri.

Dari proses responsi terhadap fenomena sosial yang ada di lingkungan sosial, maka proses kontekstualisasi antara teori dengan fakta di lapangan bisa bertemu. Sehingga kegiatan-kegiatan KKN yang berbasis respon dan kontekstualisasi dari kondisi riil di lapangan bisa menjadi media bisa dikembangkan dalam KKN UIN di kota dalam 3 tahun ke depan.

**Bernando J. Sujibto:** adalah peserta KKN angkatan 67, mahasiswa Prodi Sosiologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga, pemenang pertama Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Mahasiswa PTIN/PTIS se-Indonesia 2009.